

## **BAB II**

### **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM FORUM KERJASAMA INTERNASIONAL**

Pada Bab ini Penulis akan menjelaskan politik luar negeri dalam forum kerjasama internasional , dan sub bab pertama yang akan dibahas adalah filosofi dan orientasi politik luar negeri Indonesia dari era presiden soekarno sampai jokowi, dan sub kedua juga akan membahas kerjasama internasional multilateral yang diikuti oleh Indonesia dan sub bab ketiga membahas Indonesia bergabung ke MIKTA.

#### **A. Filosofi dan Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia**

Republik Indonesia, lahir segera setelah Perang Dunia II ketika koloni menjadi negara merdeka, sangat menginginkan perdamaian. Hanya dalam suasana damai dapat memulihkan ekonomi yang rusak karena perang dan mengangkat warganya dari kemiskinan di mana mereka telah hidup begitu lama. Bahkan ketika orang Indonesia berjuang untuk membebaskan diri dari kontrol Belanda, kebebasan bukan satu-satunya tujuan mereka. ,para pemimpin gerakan nasional selalu menekankan bahwa Indonesia yang merdeka dan berdaulat hanyalah prasyarat bagi tercapainya pola hidup yang akan menjamin kemakmuran rakyat. Seperti yang dijelaskan Dalam Pembukaan UUD 19 45 yang berbunyi “ Sedangkan kebebasan adalah hak asasi semua bangsa, penjajahan harus dihapuskan di dunia ini karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan; Dan saat sukacita telah tiba dalam perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia untuk membimbing orang-orang dengan aman dan baik untuk ambang kemerdekaan negara Indonesia yang harus bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong

oleh keinginan luhur untuk menjalani kehidupan nasional bebas, rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan mereka. hal tersebut selanjutnya, untuk membentuk sebuah pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memajukan kehidupan intelektual masyarakat dan untuk berkontribusi pada pembentukan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, kemerdekaan nasional Indonesia harus dirumuskan ke dalam konstitusi Republik kedaulatan Indonesia yang didasarkan pada keyakinan dalam Tuhan yang Maha Esa, adil dan kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah antara wakil dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “ maka para pemimpin negara di Indonesia menjalankan Politik Luar negeri Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 yang tujuan demi kepentingan kemajuan bangsa dan Negara Indonesia..

Republik Indonesia menyadari bahwa kerjasama dengan negara lain adalah penting jika cita-cita ini menjadi kenyataan. Itu telah menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai titik pusat dari kebijakannya untuk mencari hubungan baik dengan semua negara lain. Lebih khusus lagi, tujuannya dalam kebijakan luar negeri adalah:

1. untuk membela kebebasan rakyat dan menjaga keamanan negara.
2. untuk memperoleh dari luar negeri barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diperlukan untuk meningkatkan standar hidup penduduk - makanan, terutama beras, barang-barang konsumsi dari berbagai jenis, obat-obatan, dan sebagainya.
3. untuk mendapatkan peralatan modal untuk membangun kembali apa yang telah hancur atau rusak,

dan modal untuk industrialisasi, konstruksi baru dan mekanisasi mekanisasi parsial pertanian.

4. untuk memperkuat prinsip-prinsip hukum internasional dan untuk membantu dalam mencapai keadilan sosial dalam skala internasional, sesuai dengan Piagam PBB khususnya dengan berusaha dalam kerangka PBB untuk membantu orang-orang masih hidup dalam sistem kolonial untuk mencapai kebebasan .
5. untuk menempatkan penekanan khusus pada memulai hubungan baik dengan negara-negara tetangga, yang sebagian besar di masa lalu menduduki posisi yang serupa (affairs, 2010).

Untuk memahami perilaku kebijakan luar negeri Indonesia saat ini, Sama seperti politisi di Amerika Serikat yang menyalurkan para pendiri, para pemimpin Indonesia melihat pahlawan kemerdekaan mereka untuk inspirasi. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, presiden pertama Indonesia - Sukarno - mengejar strategi kebijakan luar negeri yang "bebas dan aktif". Strategi tersebut mengharuskan melindungi kepentingan nasionalnya sendiri, tidak selaras dengan kekuatan utama dunia (yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat), dan membentuk ikatan yang kuat dengan negara-negara nonblok lainnya seperti India, selama periode ini, Indonesia menjadi salah satu anggota utama Gerakan Non-Blok, yang tumbuh dari konferensi pendirian kelompok yang diselenggarakan oleh Indonesia di Bandung pada tahun 1955. Setelah Jenderal Suharto berkuasa (1967-98), bagaimanapun, Indonesia terus profil internasional yang lebih rendah dan membina hubungan erat dengan Washington dan kekuatan ekonomi Barat lainnya untuk mengembangkan ekonominya.

Lalu Presiden B.j Habibie dalam menjalankan politik luar negerinya memiliki 3 fokus utama yaitu pemulihan citra

Indonesia , mendahulukan stabilitas social dan politik dan memobilisasi sumber daya demi memperoleh bantuan ekonomi. Sedangkan Pada masa era presiden Gusdur menjalankan politik luar negeri yang cukup sensational dengan melakukan Tur Negara keliling dunia yang menghabiskan 23 dari 40 hari pertama pemerintahanya. Gusdur juga mencoba melakukan hubungan diplomatic dengan Israel untuk mengindari krsisi moneter. Sama seperti Bung karno Gusdur juga berambisi mewujudkan Indonesia sebagai poros kekuatan Asia dan juga melakukan pembentukan Poros Axis Indonesia-china –india,lalu era Presiden Megawati Soekarno Putri, politik luar negeri Indonesia cenderung berkerjasama ke barat khususnya Eropa dan Amerika Serikat,dan pada era Presiden Megawati Indonesia cukup banyak mengalami masalah dalam negeri seperti konflik pulau sipadan dan ligatan yang dimana Indonesia bersitenggang dengan Negara tetanga Malaysia. Masalah ekonomi juga melanda saat Megawati menjabat sebagai Presiden hingga menyebabkan politik Luar negeri yang dijalankan Indonesia tidak berjalan dengan maksimal. mengalami.

Pada Pemerintahan Presiden SBY Apa yang kita lihat dalam sikap kebijakan luar negeri Indonesia saat ini adaampuran strategi ini. Ia terlibat dengan lingkungan internasional baik kekuatan besar maupun kecil, tetapi masih menahan diri untuk membuat komitmen signifikan yang dapat menantang pilihannya untuk tetap relatif netral dalam perselisihan internasional.

Pada negara yang terobsesi dengan Facebook dan media sosial lainnya, SBY menggunakan pidato pengukuhanannya pada tahun 2009 untuk menggambarkan pandangan strategis kebijakan luar negeri Indonesia saat ini dengan cara ini:“Indonesia sedang menghadapi lingkungan strategis di mana tidak ada negara yang menganggap Indonesia sebagai

musuh dan tidak ada negara yang dianggap musuh Indonesia, dengan demikian Indonesia dapat menjalankan kebijakan luar negerinya secara bebas ke segala arah, memiliki sejuta teman dan nol musuh. "Bagi Indonesia, memiliki "sejuta teman dan nol musuh" sangat membantu mempertahankan pertumbuhan yang mengesankan dalam perdagangan luar negeri dan investasi. Ini juga membantu menjelaskan keengganannya untuk mengambil posisi hak asasi manusia yang keras yang mungkin mengganggu mitra ekonomi utama yang memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk, seperti China.

Lebih jauh lagi, Indonesia pada umumnya malu-malu dalam membuat komitmen yang kuat untuk menegakkan hak asasi manusia di tingkat internasional karena terus berjuang dengan masalah-masalah hak asasi manusia sendiri. Baru-baru ini, misalnya, Indonesia telah melihat peningkatan intoleransi agama dan pelanggaran pemerintah yang signifikan terhadap hak-hak sipil dan kebebasan. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Muslim, isu-isu hak asasi manusia internal yang meresahkan itu menjadi ancaman nyata bagi kredibilitas klaim para pemimpinnya untuk menjadi suar demokrasi bagi demokrasi rapuh lainnya.

Kebijakan luar negeri dalam rezim SBY adalah sesuatu yang dapat kita banggakan, karena Indonesia menjadi negara yang semakin terkenal dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Faktanya, stabilitas politik Indonesia kini menjadi patokan bagi banyak negara di dunia. Tidak banyak negara demokratis yang dapat menawarkan stabilitas politik sebanyak Indonesia.,profil Indonesia di dunia global telah meningkat secara drastis, misalnya, sekitar satu dekade lalu; Indonesia tidak dipandang terlalu positif oleh AS dan masyarakat internasional. Kebijakan luar negeri aktif sejauh bahwa Indonesia tidak mempertahankan sikap pasif atau reaktif pada

isu-isu internasional tetapi mencari partisipasi aktif dalam penyelesaiannya.

Dengan kata lain, kebijakan independen dan aktif Indonesia bukanlah kebijakan yang netral, tetapi ini adalah kebijakan yang tidak menyelaraskan Indonesia dengan negara adidaya atau juga tidak mengikat negara tersebut dengan pakta militer apa pun, pada dasarnya, itu adalah kebijakan yang dirancang untuk melayani kepentingan nasional sementara secara bersamaan memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menghapuskan kolonialisme dan imperialisme dalam semua bentuk dan manifestasi mereka demi perdamaian dunia dan keadilan sosial. Ini menjelaskan mengapa Indonesia adalah salah satu anggota pendiri Gerakan Non-Blok kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada kepentingan nasional dikonfirmasi dalam pembukaan UUD 1945.

Pada era Joko Widodo Fokus pemerintah pada pembangunan negara menjadi prioritas. selain itu pemerintah juga berfokus pada mempertahankan kedaulatan Indonesia dan mengintensifkan ekonomi diplomasi Menteri Luar Negeri Retno mengatakan bahwa untuk periode pemerintahan 2014-2019 diplomasi Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh diplomat Kementerian Luar Negeri akan berhubungan dengan kepentingan rakyat. akan berhubungan dengan kepentingan rakyat .

Dengan kata lain, Jokowi ingin kebijakan luar negeri pemerintahannya untuk menguntungkan orang-orang, yang dasar, dan mengedepankan kerja diplomasi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, bahkan beberapa saat setelah pelantikan, Menteri Luar Negeri mengatakan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia tidak harus jauh dengan kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan visi dan misi

yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi Hal ini sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan oleh Presiden kebijakan luar negeri disebut kelanjutan dari politik dalam negeri. Jika politik dalam negeri adalah tindakan untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu negara maka kebijakan luar negeri merupakan upaya untuk mewujudkan kepentingan nasional dengan arena yang berbeda yang di luar negeri, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat misalnya tidak hanya dilakukan di dalam negeri tetapi juga diperoleh dari hubungan dengan negara lain. Dan orang-orang yang bekerja di luar negeri, khususnya buruh migran, juga harus diharapkan perlindungan. (Setiawan, 2016)

Dengan demikian fokus kepentingan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak hanya dicapai oleh memacu pembangunan di dalam negeri tetapi juga membuka peluang di dunia internasional, oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional yang menjadi prioritas pemerintah kebijakan luar negeri kemudian menjadi respon dan stimulus yang menghubungkan kepentingan domestik dengan peluang luar negeri, dalam studi kebijakan luar negeri sejumlah pakar fokus pada bagaimana negara merespon perkembangan internasional sebagai kelanjutan dari perubahan di negeri ini, bagaimana kebijakan politik luar negeri mengalami transformasi dari waktu ke waktu digambarkan dalam kelanjutan dari perubahan di negeri ini. Bagaimana kebijakan luar negeri mengalami transformasi dari waktu ke waktu digambarkan dalam kelanjutan dari perubahan di negeri ini.

## **B. Bentuk – Bentuk Kerjasama Internasional Multilateral yang diikuti oleh Indonesia**

Ketika Perang Dingin berakhir, Keohane (1990) berpendapat bahwa multilateralisme telah berkembang momentumnya sendiri. Itu semakin menjadi baik tujuan. Namun, multilateralisme pada titik ini masih disajikan sebagai label lebih dari sekedar konsep yang mendefinisikan program penelitian. multilateralisme adalah 'praktik koordinasi kebijakan nasional di Indonesiakelompok tiga atau lebih negara bagian, melalui pengaturan ad hoc atau melalui lembaga-lembaga, saya dengan demikian melibatkan (secara eksklusif) negara dan sering (tidak secara eksklusif) institusi, didefinisikan sebagai 'Kumpulan aturan yang terus-menerus dan terhubung, formal dan informal, yang meresepkan peran perilaku, batasi aktivitas, dan bentuk ekspektasi (Peterson, 2011) Direktorat Urusan Multilateral menetapkan program tahun 2010-2014 di bawah kerangka "Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia dalam Urusan Multilateral".

Hasil yang diinginkan adalah untuk meningkatkan peran dan diplomasi Indonesia dalam menangani isu-isu multilateral. Strategi yang digunakan dalam program di atas adalah sebagai berikut: Untuk meningkatkan partisipasi dan inisiatif Indonesia di forum multilateral yang mencakup menjadi tuan rumah bagi konferensi multilateral. Untuk mengidentifikasi dan melakukan pemeriksaan kritis demi efisiensi pada partisipasi Indonesia dalam organisasi kerja sama multilateral dengan menganalisis manfaat langsung untuk kepentingan nasionalnya. Untuk meningkatkan dukungan lintas sektoral dalam pelaksanaan kerja sama multilateral.

Indonesia sendiri banyak mengikuti forum kerja sama internasional atau multilateral seperti MIKTA, G20, ASEAN dll. Ini sesuai upaya Indonesia untuk mewujudkan kepetingan

nasionalnya yaitu memperluas pengaruh polugri dalam forum kerjasama internasional dan agenda-agenda global . misalnya di ASEAN Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN yang merupakan forum/ organisasi kerjasama internasional regional Asia tenggara Indonesia sering dianggap sebagai pemimpin alami Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengingat dimensi geografis, populasi besar, posisi strategis dan sumber daya alam.

Negara ini telah merasa berhak atas posisi kepemimpinan dan secara umum diakui oleh anggota ASEAN lainnya sebagai yang pertama di antara yang sederajat Indonesia secara tradisional telah diterima sebagai kebijaksanaan konvensional, sedikit perhatian diberikan pada sejauh mana Indonesia sebenarnya berhasil menjalankan kepemimpinan di ASEAN dan bagaimana upaya untuk melakukannya telah dirasakan oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya (Emmers, 2014).

Di ASEAN indonesia melakukan kerjasama internasional yang meliputi banyak bidang mulai dari bidang *security*, ekonomi, politik , budaya dll kerja sama internasional yang dilakukan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dan Karena Indonesia terletak di kawasan strategis di ASEAN, indonesia dapat dan harus secara efektif terlibat di masa depan di dalam ASEAN

Indonesia telah memainkan peran kunci pada momen-momen penting dalam perkembangan ASEAN: pendiriannya pada tahun 1967 dan pengembangan perjanjian pendiriannya (1976); adopsi piagam pertama (2008).

Baru-Baru ini mengangguk pada norma-norma liberal seperti pembentukan badan hak asasi manusia regional (2009) dan deklarasi hak asasi manusia (2012). Pada KTT ke-30, Jokowi berpendapat bahwa para pemimpin ASEAN "harus

memiliki keberanian untuk melihat kekuatan dan kelemahan kami sehingga akan tetap menjadi organisasi yang relevan bagi rakyatnya dan bagi dunia." Dia mendesak rekan-rekannya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kejahatan transnasional. (termasuk pembajakan, penangkapan ikan ilegal dan terorisme), untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, dan untuk memperkuat kerja sama ekonomi. di bawah Jokowi, Indonesia mendorong ASEAN untuk menjadi lebih efektif dan kooperatif. masalahnya adalah bahwa berbagai pejabat dan analis (baik di dalam maupun di luar Indonesia) menginginkan lebih dari ASEAN untuk beberapa waktu. (poole, 2017)

Sedangkan di G20 indonesia menjalankan politik luar negeri Indonesia telah merasa terhormat untuk menjadi anggota dari G20 yang didirikan pada tahun 1999. Indonesia merupakan satu-satunya negara perwakilan untuk Asia Tenggara, dan terpilih sebagai wakil didasarkan pada beberapa pertimbangan termasuk dida- lamnya ukuran populasi dan ekonomi. Indonesia telah terlibat dalam ekonomi yang lebih terintegrasi baik di tingkat regional seperti Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) atau internasional seperti di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Sejak masuknya Indonesia dalam G20, dukungan telah datang dari negara-negara tetangganya. Para pemimpin negara-negara anggota ASEAN memberikan dukungan kepada Indonesia sebagai wakil dari Asia Tenggara. Mereka semua berharap bahwa keanggotaan bisa menyampaikan kepentingan umum dari negara-negara Asia Tenggara. Dengan kata lain, seperti yang dipromosikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia di Thailand pada bulan Oktober 2009, ASEAN menetapkan posisi Indonesia sebagai mediator untuk G20 Peran ekonomi dan politik yang dimainkan oleh Indonesia sekarang bisa mengembangkan pemahaman tentang negara-negara maju dalam melihat dan memperlakukan

negara-negara berkembang sebagai mitra setara untuk kerjasama global (Salim, 2017).

Sedangkan Indonesia menjalankan Politik luar negerinya di dalam Forum Kerjasama Internasional MIKTA dengan cukup baik , Indonesia mencoba memafaatkan dengan baik forum kerjasama internasional seperti MIKTA yang didalamnya bisa melakukan kerjasama dengan bermacam-macam bidang seperti ekonomi,keamanan,politik,pariwisata,Terrorisme dll. Indonesia dalam menjalankan Politik luar negerinya terhadap MIKTA bisa dikatakan sangat baik , bahkan indonesi dipercaya menjadi ketua MIKTA tahun 2018 mengantikan periode sebelumnya yang dijabat oleh Turki.

Periode kepemimpinan Indonesia di MIKTA pada 2018 akan fokus pada isu-isu perdamaian dan keamanan serta masalah ekonomi kreatif. Fokus ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 serta upaya Indonesia untuk memajukan industri kreatif.Indonesia saat ini mengedepankan pencalonannya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 yang pemilihannya akan diselenggarakan pada bulan Juni 2018.. (Directorate of PELH, 2017).

Indonesia merupakan salah satu pelopor untuk operasi penjaga perdamaian PBB.,dan hari ini, dengan 2.688 personel yang dikerahkan di berbagai misi perdamaian PBB, Indonesia merupakan salah sepuluh tentara negara yang berkontribusi, dan yang terbesar di antara negara-negara anggota MIKTA.Komitmen indonesia dan kontribusi terhadap pemeliharaan perdamaian internasional sangat besar dari dekade ke dekade. Negara ini adalah di antara beberapa yang memiliki pusat penjaga perdamaian lembaga tengara terletak di Sentul Bogor dengan mandat untuk mempersiapkan melalui

kualitas tinggi kereta-ing militer Indonesia, polisi dan komponen non-militer operasi perdamaian. pusat ini juga berperan dalam mewujudkan visi 4.000 penjaga perdamaian di negara itu. juga penting untuk membawa MIKTA ke hati orang-orang dari negara-negara anggotanya, untuk membangun rasa kepemilikan mereka. Inilah sebabnya mengapa Indonesia sebagai ketua MIKTA berperan dalam kalender tahun-bulat kegiatan keterlibatan dengan masyarakat, kampus, pemimpin agama dan agama, serta praktisi seni dan budaya, pariwisata, dan industri film.

Indonesia sebagai ketua MIKTA tidak akan tanpa tantangan. Indonesia memberikan pengaruh untuk membuat koneksi dan sinergi dengan kelompok yang ada, terutama G-20 dan BRICS. Sebagai MIKTA komunikasi intra dan konsultasi menjadi lebih dalam dan lebih bermakna, dan tanpa membuat sendiri sebuah blok dalam blok yang lebih besar, MIKTA berada dalam posisi untuk membantu membuat G-20 lebih efektif dalam mencapai konsensus dan mencapai hasil yang konkret. Semua negara anggota MIKTA sebenarnya bagian dari G-20. hubungan dengan BRICS, itu harus saling melengkapi dan saling memperkuat, terutama dalam G-20 karena kedua negara anggota MIKTA dan BRICS juga milik G-20. Indonesia menyadari bahwa negara tidak dapat melakukannya sendiri dalam melaksanakan mandatnya sebagai Koordinator MIKTA untuk tahun 2018. Itu sebabnya Indonesia menganggap kolaborasi dan kemitraan dengan semua ters mengkarantina di rumah dan di luar negeri, serta dengan sesama anggota MIKTA, kritis. dengan fleksibilitas, informalitas dan keragaman sebagai kekuatan dan modalitas dalam memfasilitasi kolaborasi antara anggota, sangat penting bahwa MIKTA mengkapitalisasi pada karakteristik unik untuk meningkatkan jangkauan dan signifikansi global.

### **C. Indonesia Bergabung dengan MIKTA**

Seperti yang sudah dijelaskan Sebelumnya MIKTA dibentuk 17 September 2013 selama beberapa minggu terakhir, Indonesia sangat sibuk dengan kegiatan diplomatik yang membingungkan, selain menjadi tuan rumah pertemuan kerja sama ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dari 7-8 Oktober di Bali, Indonesia juga menerima para pemimpin mitra strategis utama seperti Presiden China Xi Jinping, Australia. Perdana Menteri Tony Abbott, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dan Perdana Menteri India Manmohan Singh. Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Bali Democracy Forum (BDF) pada bulan november dan pertemuan World Trade Organization (WTO) pada bulan Desember.

Namun, di tengah-tengah peristiwa diplomatik yang penting, ada satu inisiatif baru yang melibatkan Indonesia yang menerima sangat sedikit pemberitahuan dari media. di sela-sela sesi ke-68 Sidang Umum PBB di New York pada bulan September, Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan kelompok baru negara-negara yang diprakarsai oleh Korea Selatan yang disebut MIKTA, akronim baru untuk Meksiko, Indonesia, Korea, Turki dan Australia

Indonesia Sendiri Bergabung Ke MIKTA pada tahun 2013 pada masa era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sejalan dengan Politik luar negeri Indonesia pada era SBY yang menganut kebijakan Politik Luar negeri Indonesia sedang menghadapi lingkungan strategis di mana tidak ada negara yang menganggap Indonesia sebagai musuh dan tidak ada negara yang dianggap musuh Indonesia.

Dengan demikian Indonesia dapat menjalankan kebijakan luar negerinya secara bebas ke segala arah, memiliki sejuta teman dan nol musuh. "Bagi Indonesia, memiliki "sejuta teman

dan nol musuh” sangat membantu mempertahankan pertumbuhan yang mengesankan dalam perdagangan luar negeri dan investasi. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau pejabat kementerian lainnya tentang inisiatif ini orang dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia benar-benar menganut gagasan bahwa Indonesia adalah "kekuatan besar” tantangannya, bagaimanapun, berlimpah.

Pertama, anggota kelompok perlu membuktikan bahwa MIKTA bukan hanya produk obrolan di antara para menteri luar negeri di sela-sela pertemuan internasional di New York. Tentu saja, sebagai inisiator, saya yakin bahwa Korea Selatan akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa MIKTA akan berevolusi menjadi platform kerja sama yang berarti. Orang lain juga harus berbagi komitmen dan semangat yang sama tentang prospek MIKTA berkembang menjadi pemain global yang dihormati.

Kedua, peserta dalam kelompok harus memastikan bahwa konstituen domestik mereka di rumah secara luas berbagi visi. Tanpa dukungan domestik yang kuat, inisiatif semacam ini akan cepat menguap menjadi udara tipis. negara-negara peserta harus menjelaskan kepada konstituen domestik mereka sendiri mengapa inisiatif ini penting.

Ketiga, MIKTA perlu mengidentifikasi dan menyepakati bidang-bidang di mana ia dapat bekerja sama dan mengoordinasikan kegiatan kolektifnya. Negara yang berpartisipasi juga perlu menghubungkan titik-titik di antara mereka sendiri. Ini akan mengharuskan negara-negara anggota untuk meningkatkan hubungan bilateral mereka dengan satu sama lain. Tanpa kerjasama yang kuat yang menghubungkan semua anggota, pengelompokan semacam ini seringkali kekurangan kapasitas untuk bertindak sebagai entitas kolektif. Untuk Indonesia, MIKTA harus berfungsi tidak hanya

sebagai saluran untuk pencapaian kepentingan nasional kita, tetapi juga sebagai mekanisme di mana kita dapat memperkuat konektivitas global kita dan meningkatkan kontribusi kita terhadap pemerintahan global. Jika kita dapat mengelola diplomasi "kekuatan otak" kita dengan baik, maka, dan baru kemudian, kita dapat mulai mempersiapkan Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam hubungan internasional. (Sukma, 2013) dan Indonesia sekarang menjadi actor penting di MIKTA Indonesia menjadi resepentasi mewakili negara – negara di ASEAN bahkan pada tahun 2018 ini Indonesia di percaya menjadi Ketua MIKTA menggantikan Turki.